

# **PERANAN POLITISI MUDA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KECAMATAN BELAKANG PADANG TAHUN 2020 (Studi Kasus : Anggota DPRD KEPRI Komisi I)**

**Muhammad Iskandar<sup>1</sup> , Linayati Lestari<sup>2</sup> , Winda Roselina Effendi<sup>3</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau  
Kepulauan, Indonesia iskandar.ishk19@gmail.com

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau  
Kepulauan, Indonesia linayati@fisip.unrika.ac.id

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Riau  
Kepulauan, Indonesia  
Winda.effendi@gmail.com

## **ABSTRAK**

Stigma masyarakat yang tidak yakin terhadap tanggung jawab dan peran dari politisi, baik itu dari kalangan tua maupun dari kalangan muda. Tingkat kepercayaan publik terhadap politisi maupun partai politik dipengaruhi oleh adanya ekspektasi publik yang tidak dijalankan dengan baik oleh politisi atau partai politik salah satunya terhadap pembangunan infrastruktur. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan politisi muda terhadap pembangunan infrastruktur di hinterland khususnya di Kecamatan Belakang Padang. Metode penelitian yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode informan yang digunakan dalam penelitian dalam ini menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data yang digunakan melalui studi lapangan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teori Rizzo, House, dan Lirtzman untuk mendeskripsikan Wewenang, Tanggung Jawab, Kejelasan Tujuan dan Cakupan Pekerjaan. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa dalam upaya pembangunan infrastruktur di hinterland peranan politisi muda belum banyak berperan terhadap pembangunan infrastruktur atau minim pembangunan infrastruktur di hinterland. Hal ini dapat dilihat dari indikator cakupan pekerjaan yang di mana dari cakupan pekerjaan terdapat sub indikator persamaan. Dari sub inikator persamaan di jelaskan untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat. Artinya semua masyarakat sebagai kontituen harus mendapat pelayanan yang setara dan sama oleh politisi yang di wakili.

**Kata Kunci :** Peranan, Politisi Muda, Pembangunan Infrastruktur.

## ABSTRACT

*The stigma of people who are not sure about the responsibilities and roles of politicians, both from the old and from the young. The level of public trust in politicians and political parties is influenced by public expectations that are not carried out properly by politicians or political parties, one of which is towards infrastructure development. The purpose of this study is to determine the role of young politicians in infrastructure development in the hinterland, especially in Belakang Padang District.*

*The research method used is descriptive with a qualitative approach. The informant method used in this research uses purposive sampling. Data collection is used through field studies in the form of observation, interviews and documentation. Researchers use Rizzo, House, and Lirtzman's theories to describe Authority, Responsibility, Clarity of Purpose and Scope of Work. The results of this study found that in an effort to develop infrastructure .*

*The result of thus research found that efforts to develop infrastructure in the hinterland from the role of young politicians have not played much of a role in infrastructure development or have minimal infrastructure development in the hinterland. This can be seen from the work coverage indicator, where from the work scope there are equality sub-indicators. From the equality sub-indicator, it is explained to believe that there is fair distribution and that all people are served. This means that all communities as constituents must receive equal and equal services by the politicians they represent.*

**Keywords :** *Role, Young Polician, Infrastructure Development.*

### 1. PENDAHULUAN

Peranan merupakan suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang dalam terjun ke dunia sesungguhnya dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan pembangunan merupakan proses-proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan yang sangat berarti dalam struktur sosial, perilaku rakyat serta lembaga nasional dan akselerasi perkembangan ekonomi, pengurangan kesenjangan, dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan daerah selaku bagian integral dari pembangunan Nasional dilaksanakan bersumber pada prinsip otonomi wilayah serta pengaturan sumber energi Nasional yang membagikan peluang untuk kenaikan demokrasi serta kinerja wilayah guna meningkatkan kesejahteraan warga.

Tujuan utama dari pembangunan daerah merupakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut, serta guna mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut wajib lewat tahapan pembangunan yang sejalan dengan kebutuhan serta tuntutan. Pemerintah juga membuat sesuatu pembagian pada perencanaan pembangunan nasional yang tertuang pada Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional dipecah jadi Renacana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Pembangunan Tahunan ataupun Pendek

**Table 1.1 Permasalahan Dan Prioritas Usulan Kecamatan Belakang Padang**

No	Permasalahan	Usulan	Lokasi	Keterangan
1	Pembangunan Jalan Paving P=700 L=2m	Pembangunan jalan, rehabilitas, rekontruksi	Kasu RT 01s/d RT 15 Kelurahan Kasu	Volume 1400m <sup>2</sup>
2	Pembangunan pelantar beton p=1000 m l=1,5 m	Pembangunan jembatan	Tanjung Pana rt 02 rw 01 kelurahan Pemping	Volume 1500 m <sup>2</sup>
3	Drainase Kampung Tengah p=110m U:80	Pembangunan / rehabilitas drainase	Kampung Tengah rt 03 rt01	110 m <sup>2</sup>
4	Pelabuhan Beton	Pembangunan pelabuhan	RT 01/ RW 01 Kelurahan Pecong	Pelabuhan Beton

Sumber : MUSREMBANG Kecamatan Belakang Padang 2019-2024

Kemauan untuk melaksanakan pembangunan memiliki konsekuensi keterlibatan sebagian pergantian yang bernilai. Pembangunan berakhir kala struktur serta budaya sistem tidak sanggup menanggulangi permasalahan ataupun tantangan yang dihadapinya tanpa kelanjutan diferensiasi struktur serta sekularisasi budaya.

Problem pembangunan negeri bisa mencuat dari suatu ancaman terhadap kehidupan sistem politik yang berasal dari area internasional. Perihal tersebut bisa pula timbul dari ancaman yang berasal dari warga dalam wujud tekanan revolusioner yang menantang kestabilan ataupun kelangsungan hidup.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dwi Antoro, Riska, Anita, 2018. "Peran Pembangunan Politik Terhadap Pembangunan Nasional" GLOBAL CITIZEN, volume 5, No 1, hal 55.

### Gambar 1 1 Kegiatan Reses Politisi Muda Di Kecamatan Belakang Padang



Sumber : Syahid Ridho Official Site

Paradigma pembangunan nasional sudah menghadapi sesuatu pergantian yang signifikansi dari pembangunan yang bertumpuk pada Negeri jadi paradigma pembangunan yang bertumpuk pada warga ataupun istilahnya pembangunan warga. Tetapi pada praktiknya pemerintah sendiri hadapi kesusahan dalam melakukan pembangunan infrastruktur desa, mulai dari pembiayaan, pula terkadang penolakan terhadap pembangunan infrastruktur yang dialami kurang berguna oleh warga. Oleh sebab itu proses pembangunan infrastruktur dibutuhkan proses partisipasi warga serta kedudukan pemerintah dan politisi buat menggapai pergantian yang baik serta butuh terdapatnya terjalin komunikasi yang baik.

Partisipasi politik dari peran politisi yang diartikan di penelitian ini merupakan totalitas buat mematangkan mekanisme yang mengendalikan gimana keputusan politik ataupun kebijaksanaan umum diformulasikan serta diresmikan. Sebagai politisi ataupun politikus berarti jadi penyambung suara rakyat. Tugas politisi merupakan melaksanakan kebijakan bersumber pada aspirasi warga yang jadi pemimpin pemerintahan ataupun selaku anggota parlemen (provinsi, kota, kabupaten). Oleh sebab itu, hingga secara umum partisipasi politik dari politisi ialah bagian dari sistem politik salah satunya dalam pembangunan infrastruktur.

Masyarakat kurang yakin terhadap tanggung jawab dan peranan dari politisi, baik itu dari kalangan tua maupun dari kalangan muda. Tingkat kepercayaan publik terhadap politisi maupun partai politik dipengaruhi oleh adanya ekspektasi publik yang tidak dijalankan dengan baik oleh partai politik. Publik tidak punya opsi lain di luar dari partai. Hal ini di karenakan masih kuatnya stigma masyarakat bahwasanya sebagai politisi muda masih belum berkompeten terhadap tanggung jawab dari tugas sebagai wakil masyarakat atau rakyat.

## 2. METODOLOGI

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami peneliti secara holistik, melalui deskripsi verbal dan linguistik, dalam konteks alamiah tertentu dan melalui berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif mentiadakan sistem perhitungan, pemahaman yang demikian tidak selamanya itu benar. Selain itu penelitian deskriptif kualitatif.<sup>2</sup> Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan sedangkan dalam penelitian kualitatif penelitian bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu “teori”.

## 3. PEMBAHASAN

### a) Deskripsi Hasil Penelitian

Definisi infrastruktur menurut peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015, infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempunyai peranan penting dalam menyerap dan mewujudkan harapan masyarakat di daerahnya atau konstituen. Yang di mana peranan ini menjadikan tanggung jawab anggota legislatif menjadi berbeda dengan tanggung jawab lainnya.

Sedangkan definisi dari ketidakjelasan peran, dimana ketidakjelasan peran menggambarkan tidak adanya respon yang dinilai mencukupi untuk pekerjaan yang dilakukan. Artinya bahwa tidak terdapat respon menerima atau menolak atas hasil pekerjaan sehingga tidak bisa memastikan seberapa baik pekerjaan tersebut telah diselesaikan. Dalam pendapat ini dijelaskan juga bahwa ketidakjelasan peran juga menggambarkan adanya kondisi tidak tercukupinya berbagai informasi yang dibutuhkan dalam bekerja.<sup>3</sup> Deskripsi hasil penelitian ini membahas Peranan dari teori Rizzo, House, dan Lirtzman mengenai role ambiguity diukur menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Lexy J. Meleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung PT. Remaja Rosdakarta, 2007, Hal 4.

<sup>3</sup> Pratina, Anna, 2013, “*Role Ambiguity and Role Conflict Sebagai Antesenden dari job Insecurity pada Contingen Worker*”, Yogyakarta: STIM YKPN, hal 43.

## **b) Peranan Meliputi Wewenang**

Wewenang yang di maksudkan sebagai hal berwenang, kekuasaan dan hak yang di miliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan tersebut berupa kekuasaan formal, kekuasaan yang di berikan oleh undang-undang atau yang di dapatkan dari kekuasaan eksekutif administratif.<sup>4</sup> Yang di mana penggunaan wewenang tergolong menjadi dua macam yaitu:

- 1) Penggunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang sejala dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
- 2) Tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tidak menyimpang dari tujuan apa wewenang tersebut diberikan oleh undangundang atau peraturan-peraturan lain.

Terkait wewenang yang di miliki oleh politisi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keseluruhan informan yang berjumlah 11 (sebelas) orang, diketahui 5 informan merasa peranan politisi dalam menjalankan kewajibannya dapat di katakan sudah berperan dengan baik. Alasan minoritas mengatakan karna sudah merasakan politisi ini menunjukkan peranannya dengan menampung aspirasi dan memberikan pembangunan infrastruktur di daerah yang di tinggalinya.

Akan tetapi hal sebaliknya terjadi dari 6 informan lainnya yang mengatakan peranan dari politisi ini belum berperan dengan baik di daerahnya. Alasan mayoritas ini mengatakan belum banyak berperan dengan wewenang yang di miliknya, karena mayoritas ini merasa mempunyai hak sebagai konstituen yang di walili akan tetapi kebutuhan seperti pembangunan infrastruktur di dearahnya belum penuh.

## **c) Peranan Meliputi Tanggung Jawab**

Tanggung jawab menurut Burhanudin merupakan sebuah rasa kesanggupan untuk menetapkan sikap terhadap sesuatu perbuatan, kewajiban, atau tugas yang di emban dan sesanggupan tersebut untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang di lakukan.<sup>5</sup> Aspek–aspek tanggung jawab menurut Burhanudin dapat di uraikan sebagai berikut :

---

<sup>4</sup> Anggoro, F.N., (2016), “*Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Terhadap Keputusan Dan/Atau Tindakan Pejabat Pemerintahan Oleh PTUN*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10, No 4, hal 651.

<sup>5</sup> Burhanuddin, 2008, “*Teori Belajar Dan Pembelajaran*”, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, hal 12.

- 1) Kesadaran yaitu Memiliki kesadaran akan etika dan hidup jujur, baik itu dalam melakukan suatu perencanaan baik dalam melaksanakannya secara fleksibel, sikap produktif dalam mengembangkan diri.
- 2) Kecintaan dan Kesukaan yaitu tanggung jawab harus memiliki sikap empati, bersahabat dalam berhubungan interpersonal. Hal ini di karenakan suatu individu melihat kebutuhan yang lain dan memberikan potensi atau dampak bagi dirinya.
- 3) Keberanian yaitu memiliki kemampuan untuk bertindak indenpenden, mampu melihat perilaku dari segi konsenkuensi atas dasar sistem nilai.

Terkait tanggung jawab yang di miliki oleh politisi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari 10 (sepuluh) dari informan yang berjumlah 11 (sebelas) orang, menyatakan bahwa tanggung jawab atas peranannya sebagai politisi muda sudah baik, akan tetapi peranan dari pembangunan infrastruktur yang di berikan kepada konstituen juga harus merata. Mengingat di wilayah *hinterland* (Kecamatan Belakang Padang) terdapat 6 Kecamatan.

#### **d) Kejelasan Tujuan**

Kejelasan tujuan bermakna untuk diingat bahwa orang di dalam institut bertanggungjawab untuk menentukan tujuan dan menargetkan tujuan. Kejelasan tujuan dapat memutuskan pencapaian sistem, dengan satu kejelasan tujuan lebih dapat memahami bagaimana dapat menggapai target untuk menggunakan keahlian dan kompetensi dengan memperkirakan:

- 1) Transparansi yaitu merupakan suatu keterbukaan dan pertanggung-jawaban.
- 2) Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya.
- 3) Target merupakan suatu aksi atau tindakan untuk mencapai tujuan, atau dapatb dikatakan juga target itu adalah tujuan.
- 4) Pengawasan yaitu proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kejelasan tujuan yang di miliki oleh politisi, dapat ditarik kesimpulan bahwa dari keseluruhan informan yang berjumlah 11 (sebelas) orang,

#### e) Cakupan Pekerjaan

Mengetahui batasan program kerja dari bagaimana kinerjanya di evaluasi yang meliputi :

- 1) Kebijakan (*policy*) yaitu Untuk membantu pembuatan maupun pengimplementasikan kebijakan.
- 2) Perencanaan dan penganggaran (*Planning and Budgeting*) yaitu untuk membantu perencanaan dan penganggaran atas jasa yang diberikan dan untuk memonitoring perubahan terhadap rencana.
- 3) Kualitas (*Quality*) yaitu untuk memajukan standarisasi atas jasa yang diberikan.
- 4) Kesamaan (*equity*) untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan dilayani semua masyarakat.
- 5) Pertanggung Jawaban (*Eccuntabilty*) untuk meningkatkan pengendalian dan mempengaruhi pembuatan keputusan.

Cakupan pekerjaan yang di miliki oleh politisi, dapat ditarik kesimpulan bahwa 10 (sepuluh) dari informan yang berjumlah 11 (sebelas) mengatakan peranan politisi muda sudah baik terhadap pembangunan infrastruktur di wilayahnya (*hinterland*), akan tetapi mayoritas informan berharap mendapatkan kesamaan (pembangunan infrastruktur). Selain itu, kualitas peranan dari politisi muda di harapkan lebih di tingkatkan lagi mengingat dapil yang di waliki (Kecamatan Belakang Padang sebagai wilayah *hinterland*) tidak hanya 1 kelurahan saja.

#### 4. ANALISIS DATA

Analisis Data Berdasarkan hasil penelitian, secara umum data yang diperoleh peneliti dapat menjawab permasalahan yang peneliti sedang teliti. Supaya lebih teratur dan sistematis maka analisis data disajikan dalam bentuk kutipan narasi hasil wawancara perorangan dengan keseluruhan informan yang berjumlah 11 (sebelas) untuk mengetahui terkait dengan peranan politisi muda terhadap pembangunan infrastruktur kecamatan Belakang Padang Tahun 2020.

#### 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Peranan dalam upaya pembangunan di hinterland dari politisi muda belum banyak berperan terhadap pembangunan infrastruktur atau minim pembangunan infrastruktur di hinterland. Di mana tindakan ini di ukur dari indikator:

## **1. Peranan Meliputi Wewenang**

Dalam hal wewenang, politisi muda sudah menggunakan wewenangnya dengan baik. Dalam menjalankan wewenangnya, Politisi muda sebagai DPRD Provinsi Kepri, menjalankan tugas dan wewenangnya dalam legislasi dengan membahas rancangan-rancangan peraturan daerah yang akan masuk. Dalam Seperti membahas peraturan baru terkait peraturan-peraturan perda yang baru akan mengganti peraturan-peraturan perda yang lama. Di mana dalam peraturan daerah ini lebih menyesuaikan dengan peraturan-peraturan perda yang baru.

Dalam hal penganggaran sebagai dewan mendapatkan dana alokatif pikiran atau pikir yang jumlahnya menyesuaikan dengan keuangan daerah. Alokasi anggaran APBD ini di anggrakan dengan kegiatan-kegiatan yang di alokasikan tadi. Yang di mana dewan merekap dana APBD dan baru di sitribusikan oleh OPD yang masuk ke program-program OPD. Dalam hal ini pengawasan hanya dapat di lakukan sebatas level yang tidak dapat di awasi secara langsung di daerah yang sedang di bangun. Sehingga untuk memastikan pengawasan tersebut di adakan pertemuan dengan OPD dalam waktu tertentu yang berfungsi sebagai pengawasan secara tidak langsung yang di lakukan oleh DPRD Provinsi kepada OPD. Selain itu, DPRD Provinsi Kepri juga menggunakan wewenang prograssifnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, yaitu salah satunya dalam hal pembangunan infrastruktur.

## **2. Peranan Meliputi Tanggung Jawab**

Dalam hal tanggung jawab politisi muda sudah responsibility atau bertanggung jawab sebagai DPRD. Hal ini terlihat dari program-program kerja politisi muda yang sudah terealisasikan di sebagian daerah *hinterland*. Yang di mana program tersebut berasal dari semua apresiasi dari kontituen saat melakukan reses maupun pertemuan secara informal. Dari apresiasi kontituen tersebut politisi muda bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dan ini dapat di anggap sebagai bentuk tanggung jawab dari semua wewenang dan tugas yang di miliki sebagai wakil rakyat.

Tetapi, sebagian masyarakat *hinterland* lainnya belum merasa adanya peranan dari politisi muda dengan alasan belum terpenuhinya kebutuhan berupa pembangunan infrastruktur di daerah *hinterland* tersebut.

### **3. Peranan Meliputi Kejelasan Tujuan**

Pembangunan infrastruktur atau program kerja yang sudah terealisasi oleh politisi muda sebagai anggota DPRD Provinsi ini merupakan salah satu tujuan yang ingin di berikan kepada konstituen di dapil yang di wakili salah satunya wilayah *hinterland* sebagai sebagai bentuk dari tindakan nyata selama menjabat sebagai wakil rakyat di dapil yang di wakili. Tujuan lain dari pembangunan-pembangunan infrastruktur ini tentunya untuk mematahkan stigma masyarakat tentang politik itu buruk dan yang terlibat di politik itu tidak bisa bertanggung jawab kepada kontituen. Dari semua pembangunan-pembangunan infrastruktur yang di lakukan tersebut juga bertujuan agar masyarakat dapat merubah pola pikir negatif dari politik.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan kejelasan tujuan yang di harapkan oleh sebagaian besar masyarakat di *hinterland*. Yang mana sebagian masyarakat *hinterland* ini merasa belum tersampainya aspirasinya kepada politisi dengan berbagai alasan. Sehingga hal ini menjadi salah satu perbaikan untuk politisi dan masyarakat itu sendiri.

### **4. Peranan Meliputi Cakupan Pekerjaan**

Meskipun bukan termasuk dari topoksi (tugas dan fungsi) di komisi yang di jabati, akan tetapi politisi muda bisa menggunakan wewenang Progratifnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Kepri dalam melakukan pembangunan Infrastruktur di dapil yang di wakili. Dalam cakupan pekerjaan, perlu peningkatan dalam memperhatikan kebutuhan kontituen di *hinterland*. Ini di lihat dari semua program-program yang di berikan oleh politisi muda kepada konstituen di dapil yang di wakili.

Peranan yang di lakukan politi muda di hinterland masih tergolong belum banyak berperan atau minim salah satunya dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini dapat di lihat dari indikator cakupan pekerjaan yang di mana dari cakupan pekerjaan terdapat sub indikator persamaan. Dari sub inikator persamaan di jelaskan untuk meyakini adanya distribusi yang adil dan merata yang dilayani semua masyarakat. Artinya semua masyarakat sebagai kontituen harus mendapat pelayanan yang setara dan sama oleh politisi yang di wakili.

Selama melakukan penelitian “Peranan Politisi Muda Terhadap Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Belakang Padang (Studi Kasus: Anggota DPRD KEPRI Komisi D) di lapangan, peneliti menemukan beberapa peranan yang atau program yang di berikan oleh politisi muda kepada konstituen *hinterland* (Kecamatan Belakang Padang) Yaitu

dalam menjalankan hak progreatifnya sebagai anggota DPRD Provinsi, tidak hanya dalam melakukan pembangunan infrastruktur saja di wilayah dapil yang di wakili. Sebagai politisi muda, menggunakan dana alokatif dengan menyediakan beberapa sarana seperti boat ambulan di Kelurahan Pulau Terong, Kecamatan Belakang Padang. Hal ini menunjukkan kepedulian terhadap konstituen dalam hal kesehatan.

## **6. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti, peneliti memiliki saran yang kiranya berguna sebagai pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Peranan politisi muda sebagai anggota DPRD harus lebih di tingkatkan lagi kepada konstituen khususnya yang mewakili dapil Kecamatan Belakang Padang. Hal ini di karenakan di kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah kecamatan yang kelurahannya banyak terdapat di hinterland (pulau-pulau). Sehingga tidak hanya berfokus melakukan pembangunan infrastruktur di mainland saja tetapi juga pembangunan Infrastruktur di Hinterland.
- 2) Perlunya meningkatkan partisipasi dari masyarakat hinterland, hal ini juga sangat membantu pembangunan infrastruktur yang ada di daerah masing-masing khususnya hinterland. Mengingat bahwa masyarakat hinterland juga masih banyak enggan untuk bersuara terkait kebutuhan di lingkungan atau kebutuhan bersama. Dengan di adakan reses menjadi peluang untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat untuk kebutuhan bersama.

## **7. DAFTAR PUSTAKA**

### **a) Buku**

Bimo Walgito. (2003). *Psikologi Sosial. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.

Burhanuddin. 2008. *Teori Belajar Dan Pembelajaran*. Yogyakarta : Ar Ruzz Media

Lexy J. Meleong. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarta.

Muhammad Idrus. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga.

Pratina, Anna. 2013. *Role Ambiguity and Role Conflict Sebagai Antesenden dari job Insecurity pada Contingen Worker*. Yogyakarta: STIM YKPN.

Soerjono Soekanto. (2013), *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Warjio. (2016). *Politik Pembangunan (Paradoks, Teori, Aktor dan Ideologi)*. Jakarta: Kencana.

**b) Jurnal**

Dwi Antoro, R. D. (2018). Peran Pembangunan Politik Terhadap Pembangunan Nasional. *Jurnal Internasional Citizen*, Vol 5, No 1.

Siti Nur Ajizah, dkk (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 2.

Syaron Brigette Lantaeda. Dkk. 2017. “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol.4. No 48.

Wardhana, F. W. (2017). Politik Pembangunan Di Perdesaan. *Jurnal Demokrasi & Oto Wenda*, N. (2018). *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Diastrik Kanggime Kabupaten Tolligara Provinsi Papua*. *POLITICO : Jurnal Ilmu Politik*. Vol 5. No 4.